

REFLEKSI PILKADA DAN MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

Adhi Iman Sulaiman

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto
adhi_iman@yahoo.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan pembuktian sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal dalam pilkada. Menggunakan analisis dari hasil observasi partisipan dan pengumpulan data faktual dari media massa *online* khususnya dari kutipan para narasumber yang kompeten. Tujuannya untuk membuat refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan. Hasilnya terjadi problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah, yaitu dengan adanya istilah “mahar politik”, “politik uang”, besarnya biaya kampanye dan tim sukses. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan). Seharusnya kepemimpinan kepala daerah memiliki modal manusia dan modal sosial sebagai ciri model kepemimpinan transformasional.

Kata Kunci : reformasi, demokrasi, pemilihan, kepemimpinan

Abstract

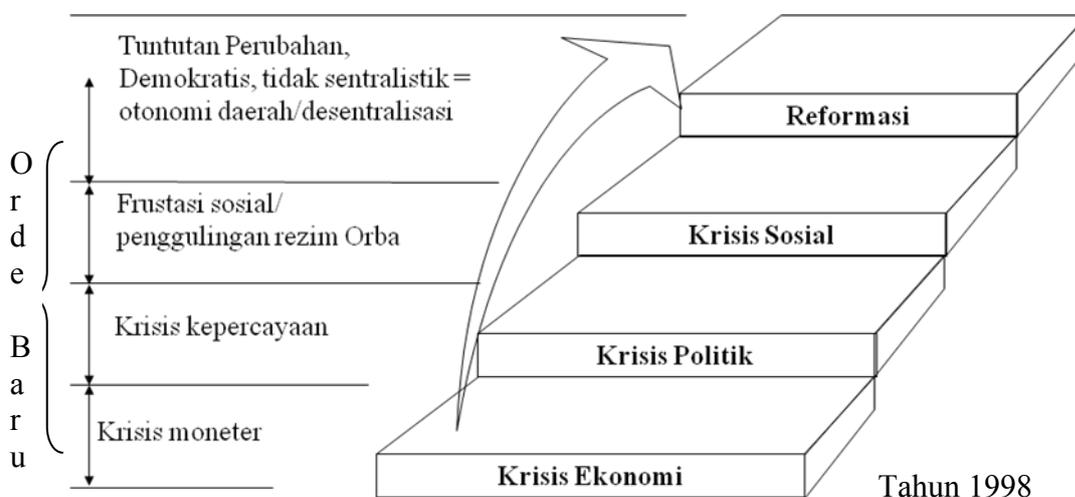
Local elections are expecting to be use for the course of evaluation proving as well the spirit of reform to achieve democratization at the local elections level. Used the analysis of participant observation and collection of data factual online media especially citation of opinions from competent experts. An aim was to created a reflection, evaluation of local elections and leadership models. This results indicated that problems the local elections started from the nomination, campaign, election, until was leader of the region, namely the existence of the term “political dowry”, “money politics” and the cost of campaigns and successful teams. It was became one of the causes of corruption in the region as a model of transactional leadership traits of the dominant power of financial capital and political capital. The leader of region should using human capital and social capital as features of transformational leadership model.

Keywords: *reform, democracy, election, leadership*

Lebih dari dari satu dasawarsa era reformasi (1998) dijadikan momentum perubahan Negara Indonesia, mulai dari tatanan hukum, politik, pemerintahan, ekonomi bahkan sosial dan budaya. Reformasi seakan menjadi fase perubahan yang ideal dan terlahir dari terpaan krisis moneter (krisis

ekonomi) yang berimbas (berbarengan) dengan krisis kepercayaan (krisis politik) hingga krisis frustasi sosial (krisis sosial) yang dapat menjatuhkan rezim orde baru. Hal ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1: Fase Penyebab Perubahan Orde Baru ke Orde Reformasi



Salah satu perubahan yang terjadi pasca reformasi adalah dengan diwujudkannya otonomi daerah dan desentralisasi yang menginginkan masyarakat ditingkat daerah lebih ikut terlibat sebagai aktor pembangunan bukan objek pembangunan. Daerah lebih berdaya untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Kemudian adanya penentuan pemimpin daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga reformasi hakekatnya terciptanya demokratisasi melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta pemilihan kepala daerah secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan dalam pemerataan.

Begitu fenomenalnya proses demokrasi di daerah dengan terselenggaranya pemilihan kepala daerah mulai dari kuantitas penyelenggaraan di seluruh daerah propinsi,

kabupaten dan kota. Hal tersebut sebagai suatu bukti sistem politik yang terbuka untuk siapapun bisa menjadi aktor politik berkompetisi saling memperkuat pengaruh. Sebagaimana menurut Edward Aspinall (dalam Mietzner, 2007: 3) *“asserted that while “the political system [in Indonesia] is open and democratic in its basic structures, and multiple actors compete to assert influence”*.

Kemudian besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada dan kampanye, serta problematika yang menyertainya. Menurut pendapat Hamdi Muluk disebutkan bahwa¹ “Pemilu dilakukan di Indonesia termasuk yang tersibuk di dunia. Namun, ironisnya pemimpin yang dihasilkan justru buruk bahkan tersangkut berbagai kasus hukum. dalam 5 tahun Indonesia menggelar 1 kali Pilpres, 4 Pemilu Legislatif, 33 Pemilu

¹ dalam <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=93333> ,17 April 2012, diakses 18 Mei 2012

Propinsi untuk memilih Gubernur dan wakilnya, 93 Pemilu Kota untuk memilih Walikota dan wakilnya, dan 403 Pemilu Kabupaten untuk memilih Bupati dan wakilnya...Artinya, dalam 5 tahun kita menggelar 534 Pemilu, atau sekitar 45 kali sebulan”.

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan ajang pembuktian sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi dalam pilkada. Sehingga perlu dicermati dan dikaji tentang kepala daerah sebagai produk yang dihasilkan dalam proses pilkada dari segi aspek kepemimpinan yang secara faktual selalu mendapat sorotan media massa.

Sehingga dalam mengkaji refleksi Pilkada dalam model kepemimpinan kepala daerah yaitu melakukan pengumpulan data dari hasil observasi partisipan dan data faktual dari media *online* dari jejaring sosial akses internet. Hal ini menjadi menarik karena media online selalu dapat diakses secara terbuka dan menyediakan data faktual sekalipun peristiwanya sudah berlangsung dengan menyertakan opini atau testimoni dari para pakar atau ahli, pengamat dan pemerhati yang berkompeten di bidang politik dan pemerintahan. Langkah kerjanya dengan mengidentifikasi dan mengelompokan terlebih dahulu permasalahan dalam proses Pilkada yaitu : (1) permasalahan pada masa pencalonan, (2) permasalahan pada masa kampanye, (3) permasalahan pada masa pemilihan, (4) permasalahan pada masa jabatan dan

setelah menjabat.

Permasalahan tersebut berhubungan dengan lebih dominannya modal finansial (*financial capital*) daripada modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang disyaratkan dalam kualitas kepemimpinan. Kemudian tetap terciptanya senralisme politik, dimana dalam ranah politik lokal pengaruh, kekuatan dan campur tangan kepentingan (kekuasaan) politik elit pusat tetap besar. Termasuk tumbuh dan ditumbuhkannya *elit capture* atau penguasa elit lokal.

Secara konseptualisasi tujuan kepemimpinan di sisi lain adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, repons yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen, efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan, kehadiran dan kesinambungan dalam organisasi. (Pace & Faules, 2010 : 276).

Selanjutnya dalam menganalisis kepemimpinan kepala daerah sebagai produk demokratisasi di tingkat lokal dalam pilkada, ada perkembangan model kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional menurut Burn (1978) bahwa model kepemimpinan yang terjadi ketika pola relasi antara pemimpin dengan konstituen, maupun antara pemimpin dengan

elit politik lainnya dilandasi oleh semangat pertukaran kepentingan ekonomi ataupun politik untuk memelihara atau melanjutkan status quo. Kemudian definisi tersebut berkembang tidak lagi dalam konteks politik akan tetapi sudah ke dalam konteks organisasional. Seperti menurut Cardona (2000) mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin menunjukkan kesetaraan penghargaan ekstrinsik (*extrinsic reward*) positif atau negatif kepada pihak yang bekerja sama dengannya. Kemudian menurut Masi & Robert (2000) kepemimpinan transaksional adalah mempertukarkan sesuatu yang berharga dengan lainnya antara pemimpin dan bawahannya (*contingent reward*).

Sedangkan kepemimpinan transformasional sebagaimana menurut Locke (1997) yaitu yang sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh bekerja menuju sasaran pada tindakan mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan organisasi menuju arah baru. Kemudian model kepemimpinan transformasional menurut Keller (1992) adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemenuhan terhadap tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow yakni kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri.

Berdasarkan latar belakang, metode, dan kajian pustaka, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai refleksi dan sekaligus

evaluasi bagi penyelenggaraan Pilkada yang sudah dan akan terus berlangsung demi demokratisasi dan kepemimpinan daerah yang menghasilkan kemanfaatan dan kemajuan nyata bagi masyarakat.

Refleksi Kepemimpinan Transaksional Kepala Daerah

Berasarkan hasil analisis hasil observasi partisipan dilapangan dalam perhelatan pilkada, yang diperkuat oleh analisis realitas yang dimunculkan sebagai fakta di berbagai pemberitaan di media massa *online*. Bahwa model kepemimpinan transaksional sangat dominan dalam proses pilkada, yaitu seperti adanya masalah “mahar politik, besarnya dana kampanye dan politik uang (*money politic*) sehingga mengakibatkan besarnya modal finansial, sebagai salah satu yang menjadi pemicu kasus korupsi para kepala daerah, serta terjadinya konflik antar masyarakat pendukung ataupun elit politik. Sebagaimana kepemimpinan transaksional menurut Burn (1978), Cardona (2000) dan Masi & Robert (2000). Hal tersebut dapat diidentifikasi dominannya kepemimpinan transaksional berdasarkan data faktual dari kutipan opini narasumber yang kompeten di media cetak *online*, sebagai berikut.

a. Fenomena “Mahar Politik”

Kepemimpinan kepala daerah lebih dominan bersifat transaksional karena dengan bukti adanya “mahar politik” dari calon kepala daerah untuk meminjau partai politik sebagai kendaraan politik yang akan mengusung atau mencalonkan

dan mendukungnya. Kemudian partai politikpun memiliki kepentingan untuk menginvestasikan kepentingan politiknya (investasi politik) jika sampai dapat memenangkan pilkada dan menjadikan “jagoannya” menjadi kepala daerah.

Realitas “mahar politik” salah satunya dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi² bahwa :

“Pernah melansir besarnya jumlah dana yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi kepala daerah (bupati/wali kota sekitar Rp.5 miliar, gubernur sekitar Rp.20 miliar). Dana sebesar itu agak mustahil dapat diperoleh kembali dari gaji yang diterima, bahkan selama lima tahun. (Gaji bupati Rp.6,2 juta, sementara gubernur Rp.8,7 juta)”

Ade Irawan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*³ menyatakan bahwa :

“Dalam masalah Pilkada yang menjadi trend sekarang ini pengusaya lokal bisa mengerucut menjadi politisi. Bagi calon incumbent harus kita waspada kalau incumbent jual beli mahar pake uang APBD...masalahnya uang mahar untuk Parpol pengusung calon dalam Pilkada sampai sekarang tetap gelap, bahwa dana yang digelontorkan itu untuk dana partai di lokal, atau dibagi ke pusat (DPP) atau hanya untuk elitnya saja. “Kelakuan orang-orang partai di lokal maupun di pusat, tidak ada yang terbuka masalah keuangan partai. Kalau tidak ada keterbukaan, ini akan dinikmati orang-orang tertentu saja”

² <http://cetak.kompas.com/read/2010/08/13/03104086/pilkada.membuat.rakyat.mata.duitan> diakses 19 Mei 2012

³ http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18695:rahmat-shah-saya-tidak-akan-beli-perahu&catid=57:nasional&Itemid=212, 27 April 2012, diakses 18 Mei 2012

Kemudian menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan⁴ menyatakan bahwa :

“Sudah bukan rahasia lagi jika parpol selalu meminta mahar agar seseorang bisa maju dalam pilkada. Hal inilah, menurut dia, yang kemudian menjebak kepala daerah untuk melakukan korupsi... Mereka melakukan itu karena untuk membayar ongkos politik yang memang mahal”

Begitupun menurut Direktur Eksekutif *Indonesia Budget Center* Arif Nur Alam yang menyatakan bahwa⁵ :

“Maraknya korupsi di daerah berakar dari kekeliruan dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada). Pilkada dijadikan ajang transaksional. Biaya tinggi dalam pemilihan membuat calon kepala daerah mencari sumbangan dari sektor swasta... biaya yang harus dikeluarkan dari kantong pribadi calon bupati minimal Rp 5 miliar, calon wali kota minimal Rp 10 miliar, dan calon gubernur minimal Rp 20 miliar. Hal itu belum sumbangan dana dari pengusaha lokal... Akibatnya, setelah calon terpilih, dia sibuk mengembalikan uang yang dikeluarkan dalam pemilihan, sekaligus mengembalikan investasi yang diberikan pihak swasta yang membantunya”.

b. Fenomena Politik Uang (Money Politic)

Kepemimpinan transaksional juga bisa dilihat dari kasus politik uang yang dipraktikkan oleh calon kepala daerah,

⁴ <http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/26/bupati-korup-parpol-dilarang-ikut-pilkada>, 26 April 2012, diakses 18 Mei 2012

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/0835256/Kenapa.Kepala.Daerah.Tersangkut.Korupsi>, 24 Januari 2011, diakses 18 Mei 2012

yaitu : **Pertama**, ketika sebelum masa kampanye, sehingga sering dituduhkan dan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh lawan politiknya sebagai tindakan illegal karena dianggap “mencuri start kampanye” atau “kampanye terselubung”. Kegiatannya bisa dirancang dengan kemas atau alasan kegiatan bakti sosial, apresiasi seni budaya, kunjungan ke kampung-kampung atau pesantren dengan kemas peninjauan lokasi, memberikan bantuan, menjaring aspirasi. kemudian pengemasan kegiatan keagamaan seperti Tabliq Akbar atau pengajian bersama, bagi-bagi sembako atau memberikan sejumlah uang dengan dalih sebagai uang transportasi dan konsumsi bagi peserta kegiatan. **Kedua**, ketika masa kampanye, juga dikemas dalam berbagai kegiatan seperti halnya yang telah dilakukan masa sebelum kampanye, namun lebih bersifat terbuka dan terang-terangan mengkampanyekan calon kepala daerah. **Ketiga**, masa sesudah kampanye menjelang pemilihan atau pencoblosan, biasanya disebut dengan istilah “serangan fajar” artinya detik-detik sebelum waktu pencoblosan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh utusan atau koordinator (tim sukses) yang telah ditunjuk, dipercaya dan dikenal dekat dengan para pemilih, dibagikan sejumlah uang baik dari rumah ke rumah (*dor to dor*) atau di tempat umum seperti warung, pasar dan kegiatan kampanye.

Realitas adanya politik uang secara faktual dari hasil survei Yayasan Paramadina bekerja sama dengan lembaga riset Pride di

Mojokerto Jatim, survei dilakukan pada 20-25 Mei 2010⁶, menunjukkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap praktik politik uang. Survei yang dilakukan dengan mewawancara 400 responden itu menghasilkan temuan bahwa rakyat bukan lagi menjadi obyek politik uang. Namun, masyarakatlah yang justru meminta praktik tersebut dijalankan.

Kemudian kelemahan pemilukada langsung (dalam Mutiarin, Hayati dan Asriyani, 2011) yaitu masih terjadinya *money politics*, *elit capture* (raja/penguasa kecil) kecurangan politik dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah. Tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Akibatnya pelayanan publik jauh dari harapan, masih belum adanya jaminan bahwa kepala daerah terpilih mampu menerjemahkan visi misi untuk pelayanan publik. Korupsi di daerah menjadi lebih tinggi pasca pemilukada yang membuat kualitas pelayanan publik semakin buruk.

Hal tersebut juga ditegaskan Staf Khusus menteri Dalam Negeri RI Muhammad Umar Syadat Hasibuan bahwa⁷ bahwa:

“Belajar dari banyaknya kejadian korupsi di semua daerah pasca pelaksanaan Pilkada

⁶ <http://cetak.kompas.com/read/2010/08/13/03104086/pilkada.membuat.rakyat.mata.duitan>, diakses 19 Mei 2012

⁷ http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7786&catid=59&Itemid=215, diakses 19 Mei 2012

tampaknya, sistim pemilihan langsung pemilihan kepala daerah masih identik dengan *money politic*. Sistim pemilihan langsung pemilihan kepala daerah sebagai salah satu instrumen demokrasi memang telah mempersilahkan bagi siapa pun untuk maju menjadi pemimpin daerah. Namun, Pilkada yang idealnya diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan menjalankan amanat rakyat untuk kemajuan suatu daerah ternyata dalam pelaksanaannya tidak murah dan membutuhkan dana besar yang berujung dihasilkannya pemimpin daerah yang mungkin melakukan tindakan korupsi demi mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan...”

c. *Besarnya Dana Strategi Kampanye dan Pemenangan*

Sifat transaksional juga dapat dilihat dari usaha calon dan yang sudah berhasil menjadi kepala daerah yaitu tidak cukup dengan hanya memberikan mahar politik kepada partai politik yang mengusungnya. Namun dengan membentuk tim sukses atau tim pemenangan untuk merancang dan melaksanakan strategi kampanye serta pemenangan. Satu hingga dua tahun sebelum masa Pilkada, partai politik dan bakal calon sudah melakukan pendekatan dan penjajakan untuk mendapat kecocokan dan optimisme dapat dijagokan menjadi kepala daerah. Saling mengunjungi, berdialog, meloby dan negosiasi terus dilakukan, baik secara informal anatr calon dan elit partai, atau calon dengan konstituen atau calon pemilih.

Kemudian secara formal dengan adanya rapat atau musayarah di tingkat ranting hingga cabang pengurus partai politik untuk penjaringan calon. Bahkan diadakan polling kepada anggota, pengurus

bahkan pemilih untuk mengidentifikasi siapa calon yang pantas menjadi kepala daerah. Survai atau polling tersebut dilaksanakan oleh partai politik dan oleh bakal calon sendiri untuk mengidentifikasi popularitas dan elektabilitas serta data penting untuk strategi kampanye.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan polling tersebut cukup besar karena biasanya memesan kepada tim khusus polling yang dipercaya dan kredibel serta jika bisa kepada lembaga yang independen seperti lembaga-lembaga survai yang sudah eksis secara nasional atau lembaga survai lokal yang dilakukan oleh para akademisi dan LSM. Bahkan ikatan kontrak kerja bisa ditingkatkan dari hanya sekedar mengerjakan jasa polling atau survai hingga menjadi tim sukses atau tim pemenangan asal ada kecocokan komitmen.

Kemudian setelah terjadi kecocokan dan komitmen antara bakal calon dan partai politik maka dibentuklah tim sukses atau tim pemenangan kampanye yang akan merancang seluruh strategi dan program kampanye serta pemenangan. Rangkaian program strategi tersebut diselenggarakan berbagai kegiatan yang telah dijelaskan sebelum, ketika dan sesudah masa kampanye, termasuk didalamnya kegiatan polling dan strategi politik uang (*money politic*). Juga strategi pengenalan dan peningkatan popularitas serta pencitraan juga melalui media massa terutama surat kabar dan internet, baligo, panflet, spanduk dan brosur. Tim sukses atau tim pemenangan juga bertugas melakukan

pendekatan, loby dan negosiasi langsung kepada tokoh-tokoh sentral di komunitas atau masyarakat tertentu yang dianggap memiliki pengaruh sebagai pendulang suara (*vote getter*) untuk menjadi pendukungnya. Tim sukses juga bisa dari para profesional yang bekerja dibelakang layar (konseptor) atau mendampingi ketika masa kampanye berlangsung. Dana yang dikeluarkan untuk membentuk tim sukses atau tim pemenangan kampanye ini sangat besar. Selain membayar (memberikan gaji atau honor) tim sukses, juga harus memfasilitasi dan mendanai rangkaian program kegiatan kampanye dan pemenangan yang diajukan serta dilaksanakan oleh tim sukses, termasuk strategi politik uang yang merupakan bagian rangkaian kegiatan tim sukses.

Kasus dominannya modal finansial (*financial capital*) dalam pilkada termasuk dalam membiayai tim sukses atau tim pemenangan, secara faktual diungkap oleh Analisis Hukum Tata Negara, Refly Harun⁸ bahwa “Para elit berusaha menang meskipun dengan berbagai cara, kata dia, karena merasa telah mengeluarkan cukup banyak dana untuk terpilih menjadi kepala daerah. Pilkada itu ongkosnya mahal. Hal ini membuat calon kepala daerah melakukan berbagai cara sehingga terjadi pemilu tidak damai”.

Kemudian menurut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Umar Syadat Hasibuan menyebutkan

bahwa⁹ :

“Mahalnya dana politik dalam mengikuti Pilkada. Memang tak sebanding dengan gaji yang didapat para calon setelah menjadi kepala daerah. Misalnya untuk calon gubernur diperlukan biaya Rp 20-100 miliar, padahal gaji yang diterima per tahun sekitar Rp 510 - 600 juta; calon bupati/wali kota Rp 0,3-10 miliar, sedangkan gaji yang diperoleh ‘hanya’ Rp 300- 420 juta/tahun....Hasil pemantauan ICW ditemukan setidaknya 54 indikasi pelanggaran ketentuan tentang fasilitas jabatan. Modus penggunaan jaringan birokrasi dalam bentuk mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi modus yang paling sering ditemukan. Hal ini sangat krusial karena pelanggaran terkait jabatan sudah mengarah pada indikasi korupsi. Pemantauan ICW juga menemukan adanya modus-modus penggunaan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) untuk pemenangan. Misalnya, penggunaan program-program populis seperti alokasi dana bantuan langsung tunai, program kesehatan gratis, sembako murah, beras untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, dan sebagainya”.

d. Fenomena Kasus Konflik dalam Pilkada

Proses pemilihan kepala daerah dalam Pilkada, juga diwarnai oleh konflik horizontal antar masyarakat sebagai pendukung kubu pasangan calon yang berbeda. Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh protes adanya kecurangan seperti : mencuri *start* kampanye, adanya *black campaign* dan propaganda dengan mendeskriditkan atau menjatuhkan pasangan yang menjadi pesaing, masalah politik uang (*money politic*) dan adanya kecurigaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap

⁸ http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211223:konflik-pilkada-akibat-tak-siap-kalah&catid=17:nasional&Itemid=30, 13 Agustus 2011, diakses 19 Mei 2012

⁹http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7786&catid=59&Itemid=215, diakses 19 Mei 2012

(DPT), kecurigaan kecurangan perhitungan serta ketidakpuasan atas kekalahan. Konflik tersebut secara terbuka yang menimbulkan kerusuhan dan aksi pengrusakan akibat bentrok fisik antar pendukung. Sehingga menimbulkan juga konflik vertikal antara masyarakat pendukung yang memprotes kecurangan dan ketidakpuasan hasil Pilkada kepada panitia Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau pihak keamanan seperti kepolisian, sehingga sampai mengakibatkan pengrusakan bahkan terjadi korban serta aksi bentrok dengan aparat keamanan. Hal tersebut terjadi karena aktor politik baik elit politik maupun aktor dari *civil society* sama-sama berusaha mencapai kepentingan dan tujuannya sehingga terkadang terjadi konflik kekerasan sebagai suatu dilema dalam politik. Seperti menurut Orjuela (Bell dan O'Rourke, 2007 : 294) bahwa :

"This dilemma is accentuated in conflict situations in which civil society may be divided along the very lines of the conflict and in which both state and non-state actors use violence to further their aims"

Sifat kritis, menganalisis objektifitas, melakukan verifikasi dan validitas pada rangkaian Pilkada oleh pasangan calon dan pendukungnya masing-masing memang perlu dilakukan sebagai bentuk pemantauan, kontrol, transparansi dan demokratisasi. Bahkan KPU dan Panwaslu memfasilitasi kepada para pemantau independen sebagai *voluntary team* dari LSM atau akademisi. Namun harus juga disertai oleh mental dan komitmen para elit politik atau pemimpin

politik terutama pasangan calon kepala daerah untuk harus "siap menang, namun juga harus siap untuk kalah".

Para pemimpin elit politik dan calon kepala daerah harus memiliki modal manusia (*human capital*) yang lebih dewasa untuk dapat memelihara modal sosial (*social capital*) yang ada khususnya dari pendukungnya. Sehingga ketika terjadi indikasi kecurigaan kecurangan dalam proses Pilkada, dapat dibicarakan secara baik-baik, mampu meredam dan memberikan pengertian serta strategi yang tidak emosional untuk melakukan komplek, protes atau keberatan. Indikasi adanya kasus pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada sesungguhnya bisa dilaporkan dengan fakta, bukti dan saksi yang jelas kepada pengawas pemilu (Panwaslu) bahkan bisa ke tingkat pengadilan seperti beberapa kasus Pilkada yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 236 C UU 12/ 2008 tentang perubahan kedua atas UU 32/2004 tentang pemerintah daerah, bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya UU ini.

Sehingga konflik terbuka antar masyarakat sebagai pendukung tidak mesti terjadi, jika pemimpin elit khususnya pasangan calon benar-benar dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh, dekat dan dicintai dengan rakyatnya. Bukan cenderung seperti "membiarkan" atau bahkan "memprovokasi" massa pendukung

untuk melakukan aksi protes kejalan hingga menyebabkan konflik terbuka, anarki dan bersifat destruktif. Hal tersebut sebagai pertanda modal sosial yang rendah dari para pemimpin di daerah, sehingga yang menjadi korban atau terkena dampak konflik hingga kerusakan adalah masyarakat di tingkat bawah yang seharusnya dilindungi, diayomi dan disejahterakan. Hal tersebut sebagaimana menurut Susanto (2003 : 208) ‘encer’nya modal sosial yang terdapat di daerah-daerah disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang tajam, sehingga memudahkan pelaku-pelaku yang berposisi selaku provokator yang masuk ke dalam sistem sosial masyarakat bersangkutan dan melakukan “adu domba”.

Fakta adanya kasus konflik Pilkada yang berlarut-larut di Kabupaten Puncak Papua yang rencananya Pilkada akan digelar 9 November 2011, namun terjadinya bentrokan antarpending Simon Alom dan Elvis Tabuni saat memperebutkan rekomendasi DPD Gerindra untuk maju ke pemilihan bupati. Sepanjang 31 Juli-Februari 2012, konflik telah menewaskan 95 orang, belum lagi ratusan yang luka-luka akibat perang terbuka antarkubu pendukung tersebut¹⁰.

Kemudian Pilkada di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua 17 Pebruaru 2012¹¹, kasus konflik antar kelompok terjadi antara dua pendukung calon bupati John Tabo

(incumbent) – H Edi Suyanto dan Usman Wanimbo – Amos Jikwadi Kabupaten Tolikara, Papua, antara 14-18 Februari yang lalu telah jatuh korban 11 meninggal dunia, lebih 201 luka, 122 rumah terbakar. Beberapa kantor rusak, sekretariat Golkar, Demokrat, Kantor Distrik serta Kantor Statistik.

Penyebabnya konflik di Pilkada Kabupaten Tolikora tersebut disebabkan massa John Tabo menolak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang dipilih berdasarkan pleno 2011/2012. Mereka menganggap menguntungkan pasangan Usman Wanimbo (menginginkan KPU/PPD lama). Sebaliknya dari pendukung Usman, menolak PPD antar waktu yang diangkat sebelumnya (menginginkan KPU/PPD baru) karena dianggap menguntungkan kubu John¹².

Kemudian kasus Pilkada Aceh yang diselenggarakan tanggal 9 April 2012, berdasarkan hasil laporan Tim Pemantau Forum LSM dan The Aceh Institute¹³ melaporkan bahwa :

“77 temuan kasus kekerasan yang terjadi dalam pilkada Aceh dengan rentang waktu 31 Maret hingga 15 April 2012, pemantauan melibatkan 80 relawan di berbagai daerah. Kekerasan paling banyak terjadi pada masa (saat) kampanye yang mencapai 44 kasus. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi yang terbanyak adalah pengrusakan fasilitas dan alat kampanye mencapai 35 kasus.... Pelaku dari aksi kekerasan itu umumnya adalah pendukung dari pasangan calon tertentu. Mereka menganggap hanya kandidat tertentu yang berhak memenangkan pilkada, sementara kandidat lain dianggap

¹⁰ <http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/03/02283935/Kasus.HAM.Papua.Kian.Temaram,3April2012>, diakses 19 Mei 2012

¹¹ <http://nasional.vivanews.com/news/read/289991-pasca-bentrok-berdarah--tolikara-kondusif>, 21 Februari 2012, diakses 19 Mei 2012

¹² <http://www.tribunnews.com/2012/02/21/150-polisi-jaga-ketat-tolikara>, 21 Pebruari 2012, diakses 19 Mei 2012

¹³ <http://www.acehbarat.com/2012/04/forum-lsm-dan-the-aceh-institute-lapor-77-kasus-kekerasan-pilkada-aceh/diakses,19Mei2012>

tidak pantas menang”

Begitupun menurut Jurnal Nasional¹⁴

bahwa :

“Dari 40 kasus yang ditemukan, 27 di antaranya terjadi pada masa kampanye. Kebanyakan dari aksi kekerasan itu terjadi di tempat umum (sekitar 22 persen). Yang menarik, sebagian besar atau 19 kasus kekerasan terjadi pada dini hari sehingga menyulitkan Panwas dan aparat keamanan mengidentifikasi para pelaku. Jumlah pelakunya juga tidak jelas. Sementara untuk tindakan kekerasan yang teridentifikasi, biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh dua sampai lima orang pelaku...Korban kekerasan paling banyak ditujukan kepada pendukung kandidat. Kerugian harta benda akibat kekerasan ini paling banyak karena ada 25 kasus kekerasan yang ditemukan berupa pengrusakan harta benda milik pendukung kandidat. Sedangkan yang mengarah kepada fisik pribadi ditemukan sebanyak delapan kasus”

Menurut Analisis Hukum Tata Negara, Refly Harun¹⁵ bahwa :

“Sebagian besar konflik pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) disebabkan oleh sikap elit yang ingin memenangkan Pilkada dengan berbagai cara,... Karena sikap elit yang belum dewasa dalam berdemokrasi menyebabkan masyarakat awam menjadi korban,...konflik-konflik Pilkada dipicu oleh perselisihan elite dan masyarakat awam hanya menjadi korban. Para elit berusaha menang meskipun dengan berbagai cara, kata dia, karena merasa telah mengeluarkan cukup banyak dana untuk terpilih menjadi kepala daerah. Pilkada itu ongkosnya mahal. Hal ini membuat calon kepala daerah melakukan

berbagai cara sehingga terjadi pemilu tidak damai.

Kasus konflik pada Pilkada Gubernur 2013 di Sulawesi Selatan, yaitu massa pendukung dua kubu pasangan calon kontestan Pilkada Sulawesi Selatan 2013 yakni Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahhar Muzakkar (IA) dan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) terlibat bentrokan pasca penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU terdapat korban luka baik yang disebabkan oleh anak panah dan juga papporo (senjata tradisional) empat orang relawan Sayang menjadi korban, sedangkan dari tim IA sebanyak tiga orang menjadi korban¹⁶.

Kasus konflik dalam penyelenggaraan pilkada menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD¹⁷ bahwa : “Kerusuhan yang terjadi pasca pemilihan umum kepala daerah terutama disebabkan adanya kecurangan yang terstruktur..., seperti ketidaknetralan aparat, baik KPU maupun pemerintah daerah..., arena para calon Kepala Daerah yang tidak siap kalah. “Sebenarnya kalau kandidatnya menerima kekalahan dengan cepat rakyat juga tidak akan bergerak apa pun”.

e. Fenomena Kasus Korupsi Kepala Daerah

Dampak dari kepemimpinan

¹⁴[http://www.jurnas.com/halaman/3/2012-04-04/204683,pemberitaan “Masa Kampanye Diwarnai 40 Kasus Kekerasan”](http://www.jurnas.com/halaman/3/2012-04-04/204683,pemberitaan%20Masa%20Kampanye%20Diwarnai%2040%20Kasus%20Kekerasan) 4 April 2012, diakses 19 Mei 2012

¹⁵ http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211223:konflik-pilkada-akibat-tak-siap-kalah&catid=17:nasional&Itemid=30, 13 Agustus 2011, diakses 19 Mei 2012

¹⁶ <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/01/pilkada-sulsel-2013-massa-dua-kubu-pasangan-calon-bentrok-makassar-rusuh/>, diakses, 31 Januari 2013

¹⁷ <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/12/078262764/Kerusuhan-Pilkada-Akibat-Ketidaknetralan-KPU-dan-Pemda>, 12 Juli 2012, diakses 19 Mei 2012

transaksional juga munculnya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah yang bersumber dari proyek-proyek pembangunan daerah yang ditransaksikan dengan para pihak rekanan investor atau kontraktor sehingga ada idiom kolaborasi “penguasa dan pengusaha”. Modus korupsi menggelembungkan anggaran biaya (*markup*) kegiatan pembangunan, penyogokan dari pihak pengembang (kontraktor) yang ingin menjadi pemenang tender proyek, atau kasus penggelapan APBD.

Sebagaimana menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, yang menyatakan¹⁸ bahwa :

“Sudah bukan rahasia lagi jika parpol selalu meminta mahar agar seseorang bisa maju dalam pilkada. Hal inilah, menurut dia, yang kemudian menjebak kepala daerah untuk melakukan korupsi. “Mereka melakukan itu karena untuk membayar ongkos politik yang memang mahal,... dalam delapan tahun terakhir sudah 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan 70% di antaranya berstatus terpidana”.

Staf Khusus menteri Dalam Negeri RI Muhammad Umar Syadat Hasibuan bahwa¹⁹ :

Persoalan serius di balik penyelenggaraan Pilkada selama beberapa tahun adalah seputar mahalnya biaya politik dan maraknya kasus korupsi di daerah. Pilkada yang dilakukan serentak di banyak daerah pada tahun 2010 dengan dana mencapai Rp

55 triliun untuk 244 daerah dikhawatirkan berdampak terjadinya korupsi masif yang menggurita”.... Hal tersebut ditegaskan juga oleh Mendagri Gunawan Fauzi bahwa “Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pilkada adalah ajang ‘bagi-bagi’ uang negara, dana pribadi, sumbangan yang legal dan tidak legal, serta tidak pernah diaudit auditor independen. Apalagi Pilkada ditenggarai dalam prosesnya menghabiskan dana politik yang cukup besar untuk seseorang dan pasangannya bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.

Sehingga sifat kepemimpinan transaksional seakan menjerat atau menjebak kepala daerah menjadi tidak fokus untuk mengabdikan bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam proses kepemimpinan kepala daerah selama satu periode atau lima tahun bisa diasumsikan bahwa pada tahun pertama, bagaimana merealisasikan janji-janji kampanye dengan kegiatan yang populis. Tahun kedua, berusaha bagaimana mengembalikan besarnya modal finansial sebagai ongkos politik yang telah dikeluarkan selama pencalonan, kampanye dan kemenangan. Tahun ketiga dan keempat, bagaimana meraih keuntungan politis dan juga finansial termasuk untuk modal pencalonan pada periode berikutnya. Tahun kelima, bagaimana melakukan kegiatan mempertahankan kekuasaan dengan berkampanye terselubung untuk lebih peningkatan popularitas dan pencitraan serta penguatan dukungan masyarakat dengan kemasan berbagai kegiatan kunjungan, peresmian dan pembangunan.

¹⁸<http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/26/bupati-korup-parpol-dilarang-ikut-pilkada>, 26 April 2012, diakses 18 Mei 2012

¹⁹http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7786&catid=59&Itemid=215, diakses 19 Mei 2012

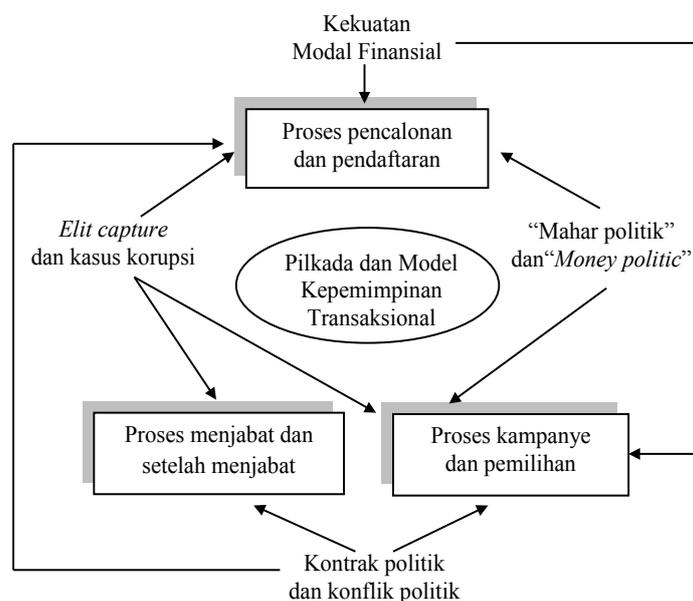
Analisis Problematika Pilkada dan Model Kepemimpinan Transaksional

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari fenomena data faktual media massa *online* yang berisikan opini dari narasumber yang kompeten, dapat dibuat suatu analisis bahwa beberapa permasalahan dalam kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut : (1) Kadar atau tingkat dari kualitas sumberdaya manusia (SDM) calon pemimpin dan pemimpin terpilih dalam Pilkada lebih dominan kekuatan daya finansial (modal keuangan) seperti (i) Adanya “mahar politik” yang disyaratkan oleh partai politik untuk bisa dipinang menjadi kendaraan politik para calon. (ii) Dana untuk tim sukses, tim kampanye dan modal kampanye yaitu membuat dan menyebarkan atribut calon serta menyelenggarakan kegiatan kampanye terbuka. (iii) Adanya praktek politik uang (*many politic*) untuk membeli dukungan atau suara rakyat. Sehingga jika tidak memiliki modal finansial, sangat berat untuk bisa memenangkan kompetisi dalam Pilkada. (2) Kontrak politik yang mengikat antara kepala daerah dengan partai politik sebagai pengusung atau pendukung (kendaraan politik). Karena bagi partai politik dengan berhasil memenangkan “calonnya” (jagoannya) menjadi kepala daerah akan menjadi investasi politik. Sehingga fokus kepada pembangunan juga selalu bermuatan politis (kepentingan politik) seperti lebih memihak konstituen, program pencitraan dan program kampanye lanjutan untuk mempertahankan dan memenangkan

pilkada berikutnya. (3) Konflik antar masyarakat (pendukung) pasca Pilkada akibat ketidakpuasan satu pihak menerima kekalahan ataupun karena kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan atau perhitungan suara. Terjadi aksi protes hingga kerusuhan. Mengakibatkan masyarakat menjadi korban dalam perhelatan pilkada demi melahirkan pemimpin daerah. Hal ini semestinya diantisipasi dengan peran aktif para calon pemimpin daerah untuk bisa memberikan pendidikan politik atau lebih tepatnya kesadaran dan kedewasaan politik. Bahwa dalam pilkada harus siap menang dan juga menerima kekalahan untuk membangun daerah. Termasuk konflik masyarakat dengan kepala daerah dengan aksi demonstrasi masyarakat meminta mundur dari jabatannya atas ketidakpuasan suatu kebijakan atau kinerja kepala daerah, dan kasus korupsi. (4) Terjadi kasus korupsi para kepala daerah, yang menandakan tidak kuatnya integritas pimpinan daerah dalam menjalankan amanah pembangunan, sehingga tergiur dan terjebak untuk mempertahankan kekuasaannya pada Pilkada berikutnya.

Hasil analisis fenomena Pilkada dan model kepemimpinan kepala daerah tersebut dapat dibuat suatu ilustrasi sebagai berikut :

Maka hal yang juga harus menjadi



Gambar 2 : Problematika dalam Pilkada

perhatian dalam memilih dan menjadi kepala daerah yaitu harus memiliki dan memenuhi aspek modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*). harapannya pilkada akan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk membawa perubahan lebih baik atau kemajuan demi terwujudnya kesejahteraan. Sebagaimana menurut de Tocqueville (dalam Susanto, 2003 : 206) berproposisi sebagai berikut : “*without social capital there could be civil society; without civil society there could be no successful democracy*”. Dengan kata lain, demokrasi yang berhasil (baca : yang tidak kebablasan) akan timbul di dalam masyarakat madani; dan agar masyarakat madani dapat terwujud diperlukan modal sosial.

Model Kepemimpinan Transformasional

Idealnya kepala daerah harus dapat menjadi pemimpin transformasional yang dari awal niat untuk memperoleh kekuasaan atas idealisme ingin memajukan potensi sumberdaya yang ada baik modal manusia (*human capital*) yang harus dikembangkan, dilibatkan dan menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sebagaimana menurut Locke (1997) dan Keller (1992), sehingga daerah harus mampu mentransformasi potensi modal manusia secara optimal. Maka kepemimpinan kepala daerah seharusnya bukan hanya memiliki ambisi untuk berkuasa dan tidak hanya memiliki modal politik dari kekuatan dukungan sekelompok komunitas salah satunya partai politik akan tetapi idealisme membangun dan berkarya serta mensejahterakan rakyat. kemudian kepemimpinan kepala daerah juga harus

memiliki modal sosial (*social capital*) yang merupakan suatu kepercayaan, keinginan berpartisipasi, dan mentransformasikan seluruh kekuatan serta sumber daya daerah untuk menuju pembangunan yang adil sejahtera. Sehingga pencitraan seorang pemimpin idealnya lahir penilaian publik atas implementasi suatu kemampuan (kompetensi) yang dimilikinya atau hasil karya yang dibuatnya. Karena citra menurut Jefkin (2004 : 56) diartikan sebagai kesan seseorang tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya.

Namun pencitraan yang selama ini dibangun dengan modal finansial yang besar, diciptakan bahkan direkayasa seperti melalui media massa oleh para elit politik sebagai modal politik untuk berkuasa. Hal ini menurut Agustino dan Yusoff (2010 : 28) adanya peralihan “politik lama” yang sentralistik ke “politik baru” yang polisentris tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berkiprah dipolitik lokal mereka yang memiliki kekuatan (*local strongmen*) dan uang (bos ekonomi) adalah pihak-pihak yang paling diuntungkan dalam demokrasi saat ini.

Namun dengan memiliki modal sosial dengan dipercaya dan mentransformasikan seluruh potensi dan partisipasi, maka pencitraan sebagai kepala daerah dengan sendirinya akan terbangun dan bahkan dikenang oleh masyarakat sebagai pemimpin yang mampu memajukan pembangunan dan mensejahterakan daerah.

Sehingga akan melahirkan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi sehingga dapat dijadikan contoh, dikenang dan didambakan sebagai sejarah oleh masyarakat. Coleman (Ballet et al, 2007 : 539) menegaskan bahwa “*an especially important form of social capital is the norm that one should forgo self-interest and act in the interest of the collectivity*”

Hal tersebut sesuai dengan empat unsur yang mendasar dalam kepemimpinan transformasional, menurut Bass & Avolio (1994) yaitu : (1) *Charisma*, yang pandangan yang diperoleh dari bawahan, sehingga pemimpin mempunyai pengaruh dan dapat menggerakkan serta dapat mengilhami bawahan dengan suatu visi yang dapat diselesaikan melalui usaha keras. (2) *Inspiration*, pemimpin dapat mengartikulasikan tujuan bersama serta dapat menentukan suatu pengertian mengenai apa yang dirasa penting dan benar, sehingga pemimpin dapat meningkatkan diri dan harapan yang positif mengenai apa yang perlu dilakukan. (3) *Intellectual Stimulation*, pemimpin membantu bawahan untuk dapat memikirkan mengenai masalah-masalah lama dengan cara baru. (4) *Individualized Consideration*, seorang pemimpin harus mampu memperlakukan bawahannya secara berbeda-beda tetapi adil.

Dalam mewujudkan pemimpin yang transformasional maka harus memiliki modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) untuk mewujudkan tujuan akhir yaitu dapat menciptakan dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Modal manusia (*human capital*) menurut Djohan (2007 : 27) adalah sumberdaya manusia yang dapat dipergunakan untuk memperoleh keuntungan baik bagi individu, masyarakat maupun dunia secara luas. Modal manusia merupakan penggerak dalam menentukan tujuan dan strategi yang ingin dicapai.

Modal manusia (*human capital*) juga sebagai investasi jangka panjang, karena jika pemimpin memiliki modal manusia yang berkualitas akan mampu menurunkan (mengkader), mengelola dan meningkatkan modal manusia lainnya yaitu masyarakat menjadi generasi unggul. Karena "*Human capital can be a strong contributor to long term growth insofar as skills attained are lifelong and can have positive effects across generations*" (Samstad dan Pipkin, 2005 : 806)

Kemudian modal sosial menurut Djohan (2007 : 31) adalah suatu keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prosesnya gerakan ini ditopang oleh nilai dan norma yang khas, yaitu: *trust* atau kepercayaan, saling memberi dan menerima, toleransi, penghargaan, partisipasi, kerjasama dan proaktif, serta nilai-nilai positif yang dapat membawa kemajuan bersama.

Begitupun menurut Susanto (2003 : 208-209) bahwa komponen penting dari modal sosial adalah akal-budi manusia dan *system thinking* serta modal sosial. Modal sosial sendiri adalah faktor kepercayaan (*trust*) atau lebih tepatnya kepercayaan

sosial (*social trust*). kemudian adanya semangat saling menghargai, menghormati, dan menghargai (*recognizing*) eksistensi dan hak-hak antar anggota masyarakat... tujuan akhirnya (*ultimate goal*) adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Karena ukuran suatu demokrasi yaitu adanya peran atau partisipasi baik dari masyarakat dan kontrol dari pemimpin untuk menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kesejahteraan lahir batin. Sebagaimana menurut Dahl and Tufte (dalam Anckar, 2008 : 434) "*size and democracy can be expected to influence democracy, namely on citizen participation, on security and order, on unity and diversity, on the common interest, on loyalties, on emotional life, on rationality, and on control of leaders*"

Simpulan

Munculnya kepemimpinan di daerah melalui proses Pilkada yaitu para kepala daerah, terdapat problematika mulai dari proses pencalonan, pendaftaran, kampanye, pemilihan sampai ketika masa jabatan. Seperti modal finansial lebih dominan daripada modal manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*) seperti adanya fenomena "mahar politik", "politik uang" (*money politic*), kemudian terjadinya konflik di masyarakat serta kasus korupsi.

Munculnya problematika kepala daerah yang lebih dominan praktek modal finansial (*financial capital*) menjadikan gaya kepemimpinannya bersifat

transaksional. Terjebak oleh kontrak politik dengan partai politik sebagai pengusung, pendukung dan kendaraan politiknya. Termasuk kontrak politik dengan investor (pengusaha) yang menjadi sponsor kampanye ketika pencalonan dan pemilihan dalam Pilkada.

Idealnya kepala daerah adalah kepemimpinan yang transformasional

yang membawa perubahan paradigma dan karakter masyarakat dengan memiliki dan memformulasi modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*), modal alamiah (*natural capital*) dan modal sosial (*social capital*) untuk mencapai tujuan akhir (*ultimate goal*) yaitu kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo dan Yosuff Mohammad, Agus. 2010. "Politik Lokal di Indonesia : dari Otokratik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*. "Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek. Kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan Pustaka Pelajar. ISSN 0854-6029. Hal : 9-30
- Angkar, Carsten. 2008. *Size, Islandness, and Democracy: A Global Comparison. International Political Science Review* (2008), Vol. 29, No. 4, 433-459
- Ballet, Jerome. Sirven, Nicolas and – Desjardins, Mélanie Requier. "Social Capital and Natural Resource Management : A Critical Perspective". *The Journal of Environment Development* 2007; Volume 16 Number 4 December 2007 355-374. Sage Publications
- Bass, B.M dan Avolio, B.J. 1994. *Improving Organizational Effectiveness Thorough Transformasional Leadership*. Thousand Oaks SAGE Publication, San Diego, CA
- Bell, Christine and O'Rourke, Catherine. 2007. *The People's Peace? Peace Agreements, Civil Society, and Participatory Democracy. International Political Science Review* (2007) Vol. 28, No. 3, 293-324. SAGE Publication
- Burns, J.M., 1978. *Leadership*, Harper & Row, New York
- Cardona, 2000. "Transcendental Leadership". *Leadership & Organization Development Journal*, 21 (4) : 1-8
- Djohan, Robby. 2007, *Leader & Social Capital : Lead to Togetherness*, Jakarta : Fund Asia Education
- Jefkin, Frank. 2004. *Public Relations*. Jakarta : Erlangga
- Keller, R.T. 1992. *Transformational Leadership and The Performance of Research and Development Project Groups*. *Journal of Management*
- Locke, E.A., 1997, *Esensi Kepemimpinan* (Terjemahan), Jakarta, Mitra Utama
- Masi, RJ & Robert A.C. 2000. Effect

- of Transformational Leadership on Subordinate Motivation, Empowering Norm's & Organizational Productivity. *International Journal of Organizational Analysis*, 8 (91) : 16-47
- Mietzner, Marcus. 2007. "Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh". *Indonesia Journal*, Vol 84. Oktober 2007
- Mutiarin, Dyah., Hayati, Nur., Asriyani, Delina. 2011. "Analisis Dampak Positif dan negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah", Paper disajikan dalam Forum Nasional Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011
- Pace, R. Wayne & Fauls, Don F. 2010, *Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Editor : Deddy Mulyana, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Samstad, James G and Pipkin, Seth. 2005. " *Bringing the Firm Back In: Local Decision Making and Human Capital Development in Mexico's Maquiladora Sector*". *World Development* Vol. 33, No. 5, pp. 805-822, 2005. Elsevier
- Susanto, Djoko. 2003, "Modal Sosial : Syarat Pembangunan Masyarakat Madani", Bagian Tiga : Mata Rantai Penyuluhan Pembangunan. Didekasikan kepada Prof. Dr. H. R Margono Slamet, "Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan, Penyunting Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, Bogor : IPB Press
- 2008. "Memperbaiki Kesejahteraan dengan Meningkatkan Daya Beli atau Daya Jual? ". *Jurnal Penyuluhan* : September 2008 Vol. 4 No 2. ISSN : 1858-2664
- 2009, "Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat", Fakultas Ekologi Manusia : IPB
- Sumber lain**
- <http://cetak.kompas.com/read/2010/08/13/03104086/pilkada.membuat.rakyat.mata.duitkan, diakses 19 Mei 2012>
- http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18695:rahmat-shah-saya-tidak-akan-beli-perahu&catid=57:nasional&Itemid=212, 27 Aril 2012, diakses 18 Mei 2012
- <http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/26/bupati-korup-parpol-dilarang-ikut-pilkada, 26 April 2012, diakses 18 Mei 2012>
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/0835256/Kepala.Daerah.Tersangkut.Korupsi, 24 januri 2011, diakses 18 Mei 2012>
- http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211223:konflik-pilkada-akibat-tak-siap-kalah&catid=17:nasional&Itemid=30, 13 Agustus 2011, diakses 19 Mei 2012
- <http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/03/02283935/Kasus.HAM.Papua.Kian.Temaram, 3 April 2012, diakses 19 Mei 2012>
- <http://nasional.vivanews.com/news/>

- read/289991-pasca-bentrok-berdarah--tolikara-kondusif, 21 Pebruari 2012, diakses 19 Mei 2012
- <http://www.tribunnews.com/2012/02/21/150-polisi-jagatketat-tolikara>, 21 Pebruari 2012, diakses 19 Mei 2012
- <http://www.acehbarat.com/2012/04/forum-lsm-dan-the-aceh-institute-lapor-77-kasus-kekerasan-pilkada-aceh/> diakses, 19 Mei 2012
- <http://www.jurnas.com/halaman/3/2012-04-04/204683>, pemberitaan “Masa Kampanye Diwarnai 40 Kasus Kekerasan” 4 April 2012, diakses 19 Mei 2012
- http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211223:konflik-pilkada-akibat-tak-siap-kalah&catid=17:nasional&Itemid=30, 13 Agustus 2011, diakses 19 Mei 2012
- <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=93333>, 17 April 2012, diakses 18 Mei 2012
- <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/12/078262764/Kerusuhan-Pilkada-Akibat-Ketidaknetralan-KPU-dan-Pemda>, 12 Juli 2012, diakses 19 Mei 2012
- http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7786&catid=59&Itemid=215, diakses 19 Mei 2012
- <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/01/pilkada-sulsel-2013-massa-dua-kubu-pasangan-calon-bentrok-makassar-rusuh/>, diakses 30 Januari 2013

